

Share

Vol. 3. No. 1, Januari 2013

Social Work Journal

- | | <i>Hal:</i> |
|--|-------------|
| 1. DETEKSI DAN INTERVENSI DINI PADA KENAKALAN REMAJA
Budi Muhammad Taftazani | 1 - 9 |
| 2. PROSES KOMUNIKASI PEMASARAN RUMAH ZAKAT:
Studi Kasus terhadap Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media
Outdoor yang Dilakukan oleh Rumah Zakat di Bandung
Maulana Irfan | 10 - 22 |
| 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN: Kasus di Jawa Timur
Purwowibowo | 23 - 42 |
| 4. PERAN INDUSTRI DALAM PENINGKATAN TENAGA KERJA LOKAL:
Studi di Zona Industri Cimanggung Kabupaten Sumedang
Muhammad Fedryansyah | 43 - 52 |
| 5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Nandang Mulyana | 53 - 70 |
| 6. PELAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA YANG MENGALAMI
PERUBAHAN SOSIAL: Studi Kasus Desa Cilamajang Kecamatan
Kawalu Kota Tasikmalaya,
Nurliana Cipta Apsari | 71 - 88 |

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
(Kasus di Jawa Timur)**

Oleh:
Drs. Purwowibowo, M.Si

Abstraks

Tulisan ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dan bagaimana masyarakat di kawasan pesisir dapat mendayagunakan sumber daya alam yang melimpah secara berkelanjutan sehingga mereka dapat keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan. Banyak model pemberdayaan masyarakat selama ini digunakan secara parsial, maka diperlukan suatu model pemberdayaan terpadu yakni memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam yang ada dan juga mendayagunakan kapasitas masyarakat pesisir secara keseluruhan. Model pemberdayaan demikian mencakup pemberdayaan individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di komunitas pesisir dan perilaku perusakan sumber daya alam tidak dilakukan. Dengan model terpadu diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan masyarakat pesisir dapat meningkat taraf hidup dan terbebas dari jaring-jaring kemiskinan.

Kata Kunci: pemberdayaan, terpadu, berkesinambungan.

Pendahuluan

Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, jumlah kecamatan yang ada pada saat ini berjumlah 662 Kecamatan. Sedangkan jumlah Desa/ Kelurahan adalah 7.721 Desa dan 785 Kelurahan, dari jumlah tersebut ada 17 * Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan pantai (BPS, 2008). Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam dan berlimpah, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan wisata pantai.

Salah satu wilayah Perairan laut selatan di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang luasnya 8.338,5 Km² diperkirakan memiliki potensi lestari sumber daya hayati 41.691,501 ton per tahun. Pada tahun 2002, potensi lestari yang telah dieksploitasi sebesar 8.023,60 ton, sehingga potensi lestari yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan, termasuk nelayan Puger, sebanyak 33.667,901 ton. Dengan demikian, laut masih menyimpan potensi sumber daya ekonomi yang bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan Puger (Kusnadi, 2008).

Namun, dibalik kekayaan potensi sumberdaya alam tersebut wilayah pesisir

dan pantai di Jawa Timur mempunyai beragam permasalahan yang mendasar yaitu sumberdaya manusianya masih marginal terutama dibidang pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir mayoritas masih rendah, karena pekerjaannya mereka berkaitan dengan mencari ikan di laut, perikanan tambak, dan pertanian di wilayah pesisir yang tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi serta keterampilan yang berhubungan dengan teknologi canggih. Itu sebabnya, sebagian besar penduduknya tidak mempunyai spirit tinggi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah berkembang di tengah masyarakat modern sekarang ini. Sebagian mereka menganggur (terutama generasi muda) yang tingkat pendidikannya lebih tinggi (SMP dan SMA) banyak memilih bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI), sebagai pilihan hidupnya untuk berjuang mengatasi kemiskinannya. Sementara pekerjaan di sektor perikanan (penangkapan ikan di laut) dan pertanian merupakan pekerjaan musiman, dan mereka sebagian besar berperan sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang pendapatannya cukup minim.

Sumber Daya Alam yang cukup potensial khususnya di wilayah pesisir di Jawa Timur, ternyata tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Hal ini terlihat dari data yang ada bahwa 32% masyarakat di daerah pesisir di Jawa Timur masih terbelit kemiskinan. Apabila dibandingkan antara potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah pesisir dan pantai sangatlah tidak seimbang, seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera bila dibandingkan dengan fakta yang ada sekarang ini (Ma'arif, 2009). Di wilayah pesisir banyak kantong-kantong kemiskinan, dan kesejahteraannya tidak merata. Banyak faktor yang harus diselesaikan, salah satunya adalah melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah non pesisir, yakni daerah atau wilayah pertanian sawah.

Rumusan Masalah

Risiko-risiko sosial-ekonomi pada umumnya harus ditanggung oleh masyarakat pesisir, yang sebagian besar masyarakat pesisir itu adalah nelayan miskin. Di Jawa Timur sekarang ini (dan juga wilayah pesisir lainnya di Indonesia) tidak hanya karena menurunnya hasil tangkapan yang berupa ikan, udang, dan hasil laut lainnya, tetapi juga kerusakan ekosistem pesisir serta perubahan iklim secara global yang mempengaruhi kondisi perairan. Angin kencang, gelombang

besar, hujan deras, serta mudarnya pola-pola iklim dan musim ikan, telah berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat pesisir, karena mereka tidak dapat lagi secara optimal dan konsisten melaksanakan kegiatan penangkapan. Kondisi iklim yang tidak menentu telah menimbulkan musim paceklik berkepanjangan dan akibat-akibat ekonomi yang menekan kehidupan nelayan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir atau nelayan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Situasi demikian merupakan masalah paling aktual pada masyarakat pesisir atau nelayan yang belum bisa dipecahkan secara komprehensif, yakni berkaitan dengan sumber daya manusia dan ketrampilannya, yang bermuara pada kondisi kemiskinan. Atas dasar di atas, ***Apa yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka mampu keluar dari jeratan kemiskinan yang selama ini akrab dengan kehidupan mereka?***

Kerangka Teoritis

Pendekatan pembangunan di negara-negara sedang berkembang terus mengalami perubahan sejak tahun 1950-an, pendekatan yang silih berganti menjadi arus utama dalam pelaksanaan

pembangunan masyarakat. Pada era 1980-an (Korten 1984), mengemukakan suatu pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau orang (*people centered development*) dan menjadi arus utama pendekatan sampai sekarang. Menurut Sutomo (2011: 65-66), model pendekatan demikian, masyarakat sampai komunitas terbawah, diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dalam menikmati hasil pembangunan. Paradigma ini sesungguhnya bisa dimaknai sebagai reaksi atas pendekatan modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dalam kenyataannya banyak mengalami distorsi atau kegagalan (Midgley, 1995).

Salah satu dampak negatif dari paradigma modernisasi, adalah bahwa pemegang kekuasaan terus menjadi semakin kuat (*powerfull*), sedangkan masyarakat dipihak lain menjadi semakin lemah (*powerless*) dan bahkan tidak memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan pendekatan yang digunakan lebih bersifat sentralistis, *top-down*, dan mengutamakan keseragaman (*uniformitas*). Sebaliknya asumsi yang digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada

masyarakat adalah bahwa masyarakat atau komunitas yang paling tahu kebutuhannya sendiri. Jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka, yang pada akhirnya banyak yang gagal di tengah jalan dalam implementasinya.

Oleh karena itu, antitesis dari perspektif sebelumnya adalah pembangunan yang berpusat pada manusia, yakni sebelumnya bersifat sentralistik harus diubah menjadi desentralisasi, *top-down* menjadi *bottom-up*, *uniformity* menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses belajar, ketergantungan menjadi keberlanjutan, *social exclusion* menjadi *social inclusion*, *improvement* menjadi *transformation* (Sutomo, 2011: 71-88).

Pengembangan komunitas penekanannya adalah pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses untuk membantu orang lain agar mereka mampu mendapatkan sesuatu untuk mengatasi kehidupannya sendiri. Adam (1996, p.5) mendefinisikan pemberdayaan sebagai:

"suatu sarana bagi individu, kelompok, dan komunitas menjadi lebih mampu untuk mendayagunakan lingkungannya dan mencapai tujuannya. Untuk mencapai pemberdayaan demikian bisa melalui jalan dan orientasi politik yakni dengan melakukan pembelaan dari masalah konflik kekuasaan".

Dalam pendekatan teori dan praktik pengembangan komunitas, Popple (1996), menekankan pendekatan pruralis yang merupakan perspektif politik yakni melawan signifikansi umum bagi kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam melakukan pembelaan dengan memusatkan pada kekuatan dan pengaruh. Perspektif ini yakin bahwa di masyarakat terdapat banyak sekali kelompok kepentingan, seperti kelompok keagamaan, organisasi perdagangan, partai politik, kelompok penekan, yang berkolaborasi dengan berbagai kekuatan yang ada di pemerintahan pusat. Kesemuanya berbagi keseimbangan di dalam bersaing untuk mendapatkan kepentingannya melalui kekuasaan sehingga dapat berdampak pada kebijakan, serta tidak ada dominasi yang terlalu kuat dari mekanisme pemerintahan. Dengan model demikian, maka pekerjaan komunitas dapat memperjuangkan pemberdayaan masyarakat pada level makro.

Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah pengorganisasian keterampilan dan kekuatan masyarakat. Menurut Kenny (2007), memberikan penjelasan tentang model pemberdayaan komunitas dengan menyediakan contoh nyata yakni bagaimana mengorganisir ketrampilan dan kekuatan masyarakat dalam rangka ambil bagian dalam mengendalikan

komunitasnya. Pemberdayaan komunitas ini bermaksud untuk mengembangkan struktur baru, sumberdaya, dan proses yang komunitas dapat mengidentifikasi dan menempatkan masalah, kebutuhan, dan problem yang dihadapinya sendiri.

Bahkan Hoy dan Rowley (1996), mengemukakan perlunya jiwa *entrepreneurship* masyarakat perdesaan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang cocok bagi komunitas desa (*rural*) dan juga masyarakat pesisir. Untuk menyambung hubungan antara komunitas urban dan rural, sehingga bisa menjadi hubungan yang saling menguntungkan oleh Foster-Bey (1997) haruslah dibangun 'jembatan-penghubung' sebagai strategi pemberdayaan komunitas lokal, yakni penghubung antara perekonomian perkotaan dengan perekonomian perdesaan serta perekonomian pesisir dengan perekonomian darat. Jembatan demikian dimaknai sebagai terjalannya jaringan antara perekonomian regional dengan perekonomian lokal dan lokal dengan lokal.

Keseimbangan hubungan perekonomian perkotaan dengan perdesaan, pesisir dengan darat akan membantu terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Beder (1993), menjelaskan perlunya strategi pemberdayaan masyarakat yang dinilainya sama dengan

melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang sedang kita laksanakan sekarang ini dengan tidak melakukan penurunan atau penipisan sumber daya lingkungan yang manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya di masa depan. Generasi mendatang mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan, jika tanah mengalami degradasi, sumber daya alam seperti ikan di laut dan hutan telah habis, atau seluruh badan air mengalami polusi. Dengan demikian strategi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjamin kegiatan ekonomi dapat menyediakan bahan makan bagi masyarakat, perumahan, barang produksi dan dapat memberikan layanan yang memadai bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, Ife dan Frank Tesoriero (2008: 241-260), dalam kaitannya dengan strategi pemberdayaan masyarakat lebih menekankan lokal genius yakni: (1) menghargai pengetahuan lokal; (2)

menghargai kebudayaan lokal; (3) menghargai sumber daya lokal; (4) menghargai ketrampilan lokal; (5) menghargai proses lokal; (6) bekerja dalam solidaritas. Selain itu untuk melakukan perubahan sosial dari bawah landasan ideologisnya adalah (1) pluralisme; (2) sosialisme demokratis; (3) anarkhisme; (4) post-kolonialisme; (5) post-modernisme; dan feminisme.

Sehubungan dengan itu, Cramb (2002) mengemukakan bahwa perlu menyertakan peranan lembaga tradisional di dalam masyarakat sebagai strategi pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat pesisir. Serta diperlukan kekompakan anggota masyarakat yang oleh Traynor dan Andors (2005) disebut dengan pengorganisasian jaringan dalam rangka strategi membangun keutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Banks et al. (2004) strategi pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan reformasi pemerintahan lokal. Hal ini dianggapnya sebagai bagian sangat penting untuk membawa anggota dewan dan anggota pemerintahan untuk lebih mendekat kepada masyarakat lokal dalam berperan di dalam kepemimpinan masyarakat dan mengajak masyarakat lokal di dalam mengkonsultasikan dan berpartisipasi di dalam menentukan kebutuhan dan kebijakan

pembangunannya. Dalam penelitiannya Banks (2004), menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi, khususnya pengaruh manager program, proyek, dan pemberi layanan dalam melibatkan mereka ke dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Konsep tentang "praktik komunitas" digunakan di dalam kerangka kerjasama dengan masyarakat yang fokusnya tidak hanya pada pekerja sosial dan pekerja pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan profesi lain, anggota kelompok manajer komunitas itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat disebut sebagai investasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Midgley dan Amy Conley (2010), menjelaskan tentang strategi pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada investasi sosial, yakni mengutamakan intervensi praktik pada peran masyarakat atau komunitas. Para praktisi pengembangan komunitas yakin bahwa sebagian besar klien dalam pekerjaan sosial dapat ditangani dalam *setting* komunitas, meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka akan dapat hidup mandiri di dalam komunitasnya. Dengan *setting* komunitas tersebut pemberdayaan masyarakat dapat mengabaikan penggunaan fasilitas yang ada di rumah klien atau di tempat panti, sehingga dapat mempergunakan fasilitas

yang ada di komunitasnya. Pekerja sosial hanya melakukan pendampingan saja, meskipun secara profesional, berdasarkan pendekatan keahlian harus lebih banyak melakukan praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan organisasi pemberdaya lainnya serta kelompok lain menggunakan ketrampilan lobi dan pembelaan (*advocacy*) untuk mendukung pencapaian tujuan ideal yang diinginkan oleh pekerjaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan yang terorganisir dari masyarakat adalah merupakan gerakan yang berasal dari atas (*top-down*), yakni suatu program yang dirancang oleh pemerintah, dalam kenyataannya banyak mengalami hambatan dan kegagalan. Oleh karena itu, perlu memperhatikan dan menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat yang merupakan suatu gerakan kesadaran komunitas (*bottom-up*), gerakan yang berasal dari masyarakat dan dilakukan sendiri oleh mereka itu banyak keberhasilannya. Chaskin (2001), menyebutnya bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat demikian sebagai suatu upaya membangun kapasitas masyarakat (*building community capacity*) yang merupakan gerakan perubahan yang bermula dari komunitas

itu sendiri. Gerakan komunitas demikian oleh Zeuli dan Radel (2005), perlu disertai adanya kebersamaan di antara anggota masyarakat sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, Gittell dan Vidal (1998) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat adalah membangun dan mengorganisir modal sosial.

Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir merupakan salah satu penyebab menurunnya sumber daya alam yang ada. Pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pula terhadap upaya memulihkan (*me-restorasi*) dan melestarikan (*sustainability*) lingkungan yang oleh (Ife dan Tesoriero, 2008; Zhang (2011) disebutnya dengan *reaksi green*. Sebagaimana Brown (2007) untuk memulihkan lingkungan tidak harus menggunakan teknologi canggih, tetapi yang diperlukan adalah teknologi tepat guna yang berasal dari masyarakat lokal. Karena banyak teknologi masyarakat lokal yang merupakan lokal genius (kearifan lokal), bukan hanya murah dari segi pembiayaan, tetapi juga ramah lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, Undang-Undang No. 27, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan kewajiban pemerintah (pusat/daerah) dalam memberdayakan masyarakat pesisir diatur dalam Pasal 63. Penuangan komitmen pemerintah ke dalam Pasal 63 untuk memberdayakan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa masalah pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk mendinamiskan kegiatan ekonomi pesisir. Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut juga mencerminkan bahwa di kawasan pesisir memang ada masalah sosial ekonomi dan lingkungan yang harus dibenahi dan diselesaikan.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang kehidupannya tergantung kepada sumber daya alam di wilayah pesisir. Masyarakat ini juga mengalami perubahan-perubahan sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari penggunaan

teknologi penangkapan ikan, baik berupa perahu, alat tangkap, sampai perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya masyarakat pesisir di wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai, berjalan agak lambat dibandingkan dengan masyarakat petani di darat. Meskipun sumberdaya alam pesisir sangat melimpah, tetapi kondisi masyarakat pesisir belum pernah beranjak dari kemiskinan.

Dalam lima tahun terakhir ini, kondisi perikanan tangkap di berbagai wilayah Pesisir Jawa Timur memasuki masa pasang surut. Biaya-biaya operasional melaut terus membengkak. Banyak perahu payang (besar) yang harus bersandar, tidak melaut, karena ketidakmampuan pemilik perahu menyediakan biaya operasional. Sebagian perahu dijual dan dana yang diperoleh dibelikan perahu-perahu jukung atau perahu-perahu berukuran lebih kecil. Jenis perahu demikian tidak memakan biaya operasional yang besar dan hasil tangkapan relatif stabil.

Jumlah perahu-perahu kecil seperti di atas terus bertambah sebagai cermin adaptasi ekonomi masyarakat nelayan

menyikapi dampak negatif terus menurunnya hasil tangkapan ikan beberapa waktu lalu sampai sekarang ini. Pertambahan jumlah perahu-perahu kecil tidak berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas hasil tangkap, pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup nelayan, dan bahkan disebut berkorelasi negatif atau mengalami penurunan. Masyarakat pesisir Jawa Timur sekarang ini menghadapi situasi "invokasi ekonomi perikanan tangkap", yaitu suatu kondisi dari proses-proses ekonomi lokal, yang hasilnya hanya berfungsi untuk menopang stabilitas kelangsungan kehidupan sosial nelayan atau aktivitas ekonomi perikanan tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan subsistensi nelayan, sehingga masyarakat pesisir terjerat dalam lingkaran kemiskinan.

Ada suatu Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang dengan program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Di samping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan

kemiskinan. Oleh karena itu, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai harus dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar *stakeholders* dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya, diperlukan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs 2015, khususnya di bidang perekonomian masyarakat perdesaan dan pesisir, yakni berkurangnya angka kemiskinan absolut dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, (*human development*), keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan

mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.

Secara umum, kajian-kajian terhadap nelayan dan manajemen sumber daya pesisir dan laut (SDP-L) dianggap sebagai topik yang sangat penting jika kita akan membangun kawasan pesisir. Dua pertimbangan lain yang mendasari nilai penting kajian tersebut adalah; *pertama*, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir Indonesia sampai dengan saat ini masih menghadapi masalah sosial ekonomi yang kompleks, dan *kedua*, kawasan pesisir dan sumber daya laut yang ada sebagian menghadapi persoalan lingkungan yang serius dan sebagian yang lain belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, untuk menangani persoalan pembangunan di kawasan pesisir diperlukan landasan pemikiran yang konseptual, komprehensif, dan visioner sehingga upaya-upaya membangun kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dapat tercapai dengan baik.

Kalau persepsi di atas kita kaitkan tentang bagaimana masyarakat pesisir melakukan eksploitasi terhadap sumber daya pesisir-laut, khususnya sumber daya perikanan, ada empat pola perilaku sebagai berikut: (1) mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2)

mengeksploitasi sumber daya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau (mangrove) serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti *trawl* atau *minitrawl*; serta (4) mengeksploitasi sumber daya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan komitmen pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2009). Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir maka peningkatan hasil sumber daya alam dengan tindakan konservasi harus terus ditingkatkan agar terjadi kelestarian sumber daya dan kelestarian lingkungan.

Agar program restorasi lingkungan dan sumber daya alam dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten/kota berpesisir harus mengambil peran yang lebih besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada program pemberdayaan dari pemerintah pusat atau lebih mengedepankan program

pemberdayaan yang *bottom-up*. Kebijakan demikian bisa ditempuh dengan mengefektifkan peran lembaga lokal yang ada dan juga memperkuat kapasitas peran pemerintahan desa berpesisir, dengan memperbesar anggaran pembangunan desa atau alokasi dana desa (ADD). Dalam konteks otonomi daerah di tingkat kabupaten, otonomi desa merupakan pilar utamanya. Dewasa ini struktur pemerintahan desa tidak hanya terdiri atas eksekutif, tetapi juga memiliki lembaga perwakilan, yakni Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintahan Desa memiliki kewenangan membuat peraturan desa. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan masyarakatnya dalam rangka pembangunan pedesaan, khususnya di wilayah pesisir, merupakan cara konstitusional yang efektif dan sah untuk memperkuat otonomi daerah di tingkat kabupaten dan juga di pedesaan. Dengan strategi politik pembangunan yang demikian, program-program pemberdayaan dari pemerintah pusat dipadukan dengan program pemberdayaan dari masyarakat setempat sehingga akan lebih efektif dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pedesaan berpesisir.

Model Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terpadu

Perangkap kemiskinan masyarakat pesisir dan masyarakat pedesaan pada umumnya di Dunia Ketiga, yakni: (1) kemiskinan jasmani dan rohani; (2) kelemahan fisik; (3) isolasi; (4) kerawanan; (5) ketidak-berdayaan. Kelima perangkap kemiskinan ini saling kait-mengkait satu dengan yang lain sebagai suatu keseluruhan (Chambers, 1987). Sebagai orang luar, yang hanya bisa menawarkan suatu resep yang mungkin belum tentu cocok, bahwa untuk menghilangkan perangkap kemiskinan masyarakat pedesaan dan masyarakat pesisir, harus diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, perlu prioritas dan strategi pembangunan yang membela dan berpihak terhadap orang miskin.

Untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin kita dapat memahami kondisi kemiskinan masyarakat pedesaan dan perlu dikembangkan sikap positif, terutama bagi para profesional dan ilmuwan yang berkecimpung di dalam pembangunan desa. Misalnya, (1) harus menghilangkan sikap anti kemiskinan, artinya kita harus berusaha membantu orang miskin keluar dari jerat kemiskinannya; (2) tinggal bersama lebih lama. Dengan tinggal lebih lama pada kehidupan masyarakat miskin, maka dapat merasakan dan memahami kondisi kemiskinan mereka; (3) Berlakulah seperti orang kecil atau miskin. Jangan

menjaga jarak dengan mereka, cara berpakaian, cara makan, berbicara, dan lain sebagainya (Chambers, 1987).

Dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dukungan fasilitas yang bersifat fisik, seperti modal usaha, teknologi, dan pelatihan lebih dipahami sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Sukmana (2010), pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan melalui pengembangan komunitas berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, esensi pemberdayaan sebenarnya sangat terkait erat dengan rekayasa sosial (*social engineering*) dan perubahan kebudayaan masyarakat. Dengan memahami kedua unsur yang membangun esensi pemberdayaan ini, aktivitas pemberdayaan diarahkan untuk menyiapkan masyarakat memiliki cara pandang, wawasan, metode berfikir, dan perilaku budaya yang bersifat progresif, peka, dan berorientasi masa depan, sehingga mereka mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran yang merata. Dengan orientasi berpikir dan kapasitas diri yang optimal upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kemandirian dan memanusiawikan manusia dapat dicapai secara efektif.

Karena tujuan pemberdayaan dikonstruksi seperti di atas, maka aktivitas pemberdayaan masyarakat pesisir didasarkan pada prinsip-prinsip tatanan pemikiran (*paradigma*) sebagai berikut :

Pertama, aktivitas pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan aktualisasi dari tanggung jawab moral, filosofis, dan etis dari siapa pun atau lembaga mana pun terhadap sesama warga masyarakat pesisir yang tertimpa ketidakberdayaan. Kewajiban dan kebajikan sosial ini ditujukan untuk membebaskan masyarakat pesisir dari ketidakberdayaan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Karena itu, asas-asas pemberdayaannya adalah komitmen kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi partisipatif.

Kedua, aktivitas pemberdayaan adalah suatu proses sosial, sehingga kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara instan/polaroid, tanpa perencanaan yang komprehensif, dengan dimensi waktu yang memadai. Untuk itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan sampai masyarakat pesisir yang diberdayakan tersebut mencapai tingkat kemandirian total. Dalam hal ini, tugas-tugas fasilitator pemberdayaan menjadi sangat penting.

Ketiga, aktivitas pemberdayaan harus berbasis pada potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dan lingkungannya. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat

menunjungnya, yakni pemetaan potensi sumber daya sosial dan sumber daya lingkungan pesisir, serta pemahaman yang tepat terhadap struktur sosial masyarakat pesisir, pranata, model kepemimpinan lokal, dan aspek-aspek budaya lainnya.

Keempat, kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir harus ditunjang oleh hubungan dan jaringan kemitraan yang luas (*partnership building*) dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*), seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta (korporasi), dan LSM/LPSM. Peran masing-masing pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengorganisasi kontribusi sumber daya yang diberikan dan mengefektifkan pengelolaannya dalam rangka pencapaian tujuan pemberdayaan.

Kelima, agar kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan rumusan strategi atau model yang bersifat kontekstual, berbasis modal sosial-budaya masyarakat lokal, dan berorientasi kebutuhan riil yang mendesak dari masyarakat pesisir yang akan diberdayakan. Strategi dan model pemberdayaan ini menjadi referensi, kerangka aktivitas, dan rel berjalannya proses pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain masalah-masalah umum di atas, masalah-masalah strategis yang terjadi pada masyarakat pesisir atau nelayan dan

kawasan pesisir di berbagai daerah, di seluruh wilayah Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan. Strategi-strategi yang ditempuh untuk mengatasi hal ini adalah sebagai berikut: (1) Mendorong secara bertahap format kebijakan pembangunan kabupaten pesisir pada masa mendatang untuk lebih memperhatikan pengembangan kawasan pesisir dan masyarakatnya, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif dan komparatif sumber daya yang ada; (2) meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan di internal instansi pemerintah kabupaten atau antarpelaku pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan. Hal ini dapat meminimalisasi ego sektoral atau ego intansional, sehingga proses pembangunan berjalan efektif dan optimal; (3) mendorong pemerintah kabupaten merumuskan cetak biru (*blue print*) kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu dan berkesinambungan.

Kedua adalah keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi-perikanannya. Langkah

yang bisa ditempuh untuk mengatasi hal ini adalah sebagai berikut: (1) mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, baik yang tumbuh melalui program intervensi pembangunan atau swadaya masyarakat; (2) meyakinkan prospek dan meningkatkan komitmen lembaga perbankan terhadap pembangunan sektor ekonomi-perikanan; (3) membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarana-prasarana penangkapan secara kolektif, sehingga distribusi pendapatan yang diterima merata.

Ketiga adalah adanya relasi sosial ekonomi yang "timpang" antara nelayan dengan pedagang perantara (*tengkulak*). Untuk meminimalisasi kerugian ekonomi akibat hubungan kerja sama yang asimetris ini harus dilakukan langkah-langkah berikut ini: (1) membentuk kelompok usaha bersama untuk mengatasi pemasaran, akses modal, dan akses teknologi, sehingga mengurangi dominasi pedagang perantara (*tengkulak*); (2) mengoptimalkan peranan lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina dan TPI dan lembaga keuangan mikro lainnya, yang dapat membantu pemasaran ikan, stabilitas harga, dan akses modal, sehingga nelayan tidak bergantung mutlak pada *tengkulak*.

Keempat adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak terhadap peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas kehidupan mereka, timbulnya kemiskinan, dan sebagainya. Cara yang dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar nelayan bisa menangkap ikan sepanjang waktu; (2) melakukan pemberdayaan sosial ekonomi kaum perempuan; (2) mengembangkan diversifikasi usaha berbasis sumber daya pesisir, berbahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut; (3) memperluas kesempatan kerja sektor *off-fishing*, sehingga rumah tangga nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan melaut; (4) melaksanakan transmigrasi nelayan yang dirancang secara matang.

Kelima adalah kesejahteraan sosial masyarakat pesisir atau nelayan yang rendah, sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka. Hal-hal yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut: (1) membangun fasilitas sosial untuk kepentingan publik, seperti tempat MCK, pengadaan posyandu, pengerasan jalan kampung, penyediaan tempat pembuangan sampah dan limbah, pembuatan saluran air, penerangan kampung, penyediaan air

bersih, dan pendidikan murah, sehingga mengurangi beban pengeluaran sehari-hari rumah tangga nelayan kurang mampu; (2) mengembangkan jaminan sosial nelayan; (3) mengurangi "gaya hidup boros" atau pengeluaran rumah tangga yang kurang perlu dan mentradisikan menabung ketika pendapatan berlebih; (4) mengembangkan program pendidikan atau pelatihan kewirausahaan berbasis sumberdaya pesisir, perikanan dan kelautan, dan jasa-jasa wisata.

Penyelesaian kelima masalah strategis di atas dilakukan secara bertahap, fokus, dan terarah, sehingga sumberdaya yang tersedia dapat didayagunakan secara optimal. Karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan daerah yang progresif dan dukungan partisipasi berbagai unsur masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu dibangun dan dikembangkan pembangunan kelembagaan yang dapat menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

Pembangunan kelembagaan masyarakat pesisir dalam rangka pemberdayaan masyarakat merupakan suatu perubahan sosial yang direncanakan, yang mempunyai dimensi perubahan sistem mikro dan sistem makro. Disebut dengan sistem mikro karena perubahan sosial tersebut meliputi perencanaan, penataan, dan pembinaan

dari organisasi baru ataupun yang disusun kembali yang menganjurkan dan mewujudkan perubahan dalam nilai, fungsi, teknologi fisik, dan rekayasa sosial. Sedangkan disebut dengan perubahan sosial sistem makro, karena perubahan lembaga tersebut bersangkutan-paut dengan pendirian, perlindungan, dan pemeliharaan dari hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan dengan organisasi yang berkaitan dalam sistem sosial yang lebih luas dan diterimanya lembaga baru tersebut secara normatif di lingkungan sekitar.

Menurut Eaton (1986) pembangunan kelembagaan adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina secara terus menerus, yang meliputi inovasi yang mengisyaratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola kelakuan dan tingkah laku, hubungan perorangan dan hubungan kelompok, persepsi baru mengenai tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang direncanakan. Dasar pemikiran dari pembangunan lembaga adalah inovasi sosial yang dipaksakan oleh elit-elit lokal yang telah berkiblat pada perubahan sosial, yang kebanyakan dari mereka telah bekerja di organisasi internasional. Oleh karena itu, tidak heran jika yang dimaksudkan dalam pembangunan lembaga tersebut adalah lembaga-

lembaga yang diperlukan bagi perubahan sosial di suatu negara yang melaksanakan pembangunan dan sifat dari pembangunan lembaga ini adalah "top-down" dan bukannya "bottom-up".

Agar pembangunan kelembagaan sesuai dengan yang direncanakan maka perlu memperhatikan dengan seksama beberapa variabel (Eaton, 1986). Di antaranya: (1) kepemimpinan, yang menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan dan program yang dicanangkan oleh lembaga yang akan dibentuk; (2) doktrin, hal ini merujuk pada spesifikasi nilai, tujuan, dan metode operasional yang mendasari tindakan sosial; (3) program, yang menunjuk tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dan merupakan keluaran (out-put) dari lembaga tersebut; (4) sumberdaya, berupa keuangan, fisik, manusia, teknologi; (5) struktur intern, agar fungsi struktur dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan dan lebih bersifat "bottom-up".

Pembangunan kelembagaan yang berhubungan dengan masyarakat pesisir atau nelayan yang miskin di wilayah Jawa Timur dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

Pertama, memperkuat kapasitas pranata lokal (pengajian rutin, simpan-

pinjam, arisan, dan sebagainya) atau kelompok-kelompok nelayan sebagai basis pemberdayaan sosial ekonomi. Kelembagaan lokal ini memiliki kedudukan penting dalam mengorganisir dan mendayagunakan potensi sumber daya setempat. Dengan dukungan anggaran pembangunan daerah dan kemampuan swadaya masyarakat, para pengelola pranata lokal dan pengurus kelompok nelayan mulai mengembangkan unit pengelola keuangan anggota-anggotanya (seperti usaha simpan-pinjam) dalam rangka membangun kemandirian akan akses modal usaha, mengembangkan unit-unit usaha *off-fishing* (nonperikanan) yang dapat membantu tambahan pendapatan bagi rumah tangga nelayan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dijangkau. Program ini juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi di kalangan masyarakat pesisir atau nelayan.

Kedua, merevitalisasi kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi nelayan dan lembaga keuangan mikro atau *microfinance institution* (Khandelwel, 2007) melalui program khusus pembangunan daerah, dengan tujuan untuk memudahkan akses modal usaha nelayan dan tingkat bunga pinjaman yang terjangkau, misalnya 6%-12% per tahun. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan lokal (pemerintah desa dan

pemerintah kecamatan) sebagai ujung tombak dan basis aplikasi kebijakan pembangunan kawasan pesisir. Untuk menunjang kebutuhan ini, SDM aparatur pemerintah lokal harus didiklat sesuai dengan isu-isu pembangunan kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu peningkatan kapasitas dan peranan institusi industri rumah tangga berskala kecil-menengah dan kelompok usaha bersama dalam pengolahan hasil tangkap pada masyarakat pesisir perlu dibenahi, untuk itu diperlukan program pendampingan sosial ekonomi secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan sosial atau organisasi sosial masyarakat nelayan sebagai wadah pengelola aspirasi dan sarana pembangunan kawasan pesisir sangat diperlukan yakni, program advokasi sosial atau pendampingan sosial agar masyarakat memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan proses pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.

Perlu pula diperhatikan di dalam pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan wawasan kebaharian dan kesadaran lingkungan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kemaritiman secara berkelanjutan melalui lembaga lokal dan juga peran pemerintah lokal, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan lokal. Karena

perempuan sangat penting kedudukannya di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir, maka peran kaum perempuan dalam kegiatan sosial ekonomi kawasan pesisir tidak bisa dipandang sebelah mata, oleh karena itu diperlukan program-program pemberdayaan yang ditujukan khusus dan berorientasi dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi perempuan di kawasan pesisir.

Dengan mendasarkan pada model-model pemberdayaan masyarakat pesisir seperti diuraikan di atas yang dapat diimplementasikan pada masyarakat pesisir di wilayah Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir yang selama ini masih sulit terlepas dari belenggu kemiskinan.

Kesimpulan

Masyarakat pesisir terus mengalami pengembangan seiring dengan pemberdayaan masyarakat dan perubahan lingkungan. Meskipun demikian, masyarakat pesisir masih terus dalam kondisi yang memprihatinkan, yakni dalam kondisi kemiskinan, walaupun wilayah pesisir mempunyai sumber daya alam potensial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu,

diperlukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir baik dari luar, yang berupa program-program pemerintah maupun yang berasal dari dalam masyarakat pesisir itu sendiri. Dengan mempergunakan kelembagaan sosial yang ada di masyarakat pesisir, sesungguhnya akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditingkatkan menuju masyarakat pesisir yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. 1996. *Social Work and Empowerment*. London: MacMillan.
- Amirulloh, Sabilla, 2009. "Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan Pantai Prigi".
<http://basukide.wordpress.com/2010/11/06/perubahan-sosial-pada-masyarakat-nelayan-pantai-prigi/>
- Banks, Sarah et.al (eds) 2004. *Managing Community Practice*. Great Britain: MPG Books, Bodmin.
- Beder, Sharon, 1993 *The Nature of Sustainable Development*, Newham Australia: Scribe Publications
- Berita Resmi Statistik No. 45/07/th, XII, 1 Juli 2010
- Brown, Richard Harvey. 2007. "Appropriate Technology and The Grass Roots: Toward a Development Strategy From The Bottom Up". *Journal: Developing Economy*. Vol. 15 Issue 3 p. 253-279.
- BPS. 2008. Jawa Timur Dalam Angka.
- Chaskin, Robert J. 2001. "Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative", *Journal: Urban Affairs Review*. January. 2001. Vol. 36. No. 3. P. 291-323.
- Cramb, R. A. 2002. "The Role of Traditional Institutions in Rural Development: Community-Based Land Tenure and Government Land Policy in Serawak, Malaysia". *Journal of World Development*. Vol 18. Issue 3. P. 347-360.
- Eaton, Joseph W., 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*. Jakarta: UI Press.
- Foster-Bey, John. 1997. "Bridging Communities: Making The Link Between Regional Economies and Local Community Development". *Journal Stau. L. And Pol'y Review*. Vol 8.2 No. 25.
- Gittell, Ross and Avis Vidal. 1998. *Community Organizing. Building Social Capital as a Development Strategy*. USA: Sage Publication, Inc.
- Hanif, Hasrul. 2008. *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir: Partisipasi, Representasi, dan Demokrasi di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hoy, F. And Rowley T. D. 1996. "Entrepreneurship: A Strategy for Rural Development". *Rural Development Research: A Foundation for Policy*. p. 29-46.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero. 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kenny, Susan. 2007. *Developing Communities, For The Future*. Australia: Nelson Thomson.
- Khandewal, Anil K. 2007. "Microfinance Development Strategy for India". *Journal of Economic and Political Weekly*. Vol. 42, No. 13, Money, Banking and Finance. March-April. P. 1127 - 1235.
- Khoiriyah, Nuroinah. 2010. "Perubahan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Labuhan Kec. Brondong

Kab. Lamongan.

<http://digilib.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=ijptummpp-gdl-s1-2010-nuroinahkh-18878&PHPSESSID=bf940931a6c7eb10125149db1ce75a90>

Korten, David C. 1984. *People Centered Development, Contribution toward Theory and Planning Frameworks*. USA: Kumarian Press.

Kusnadi, 2008, "Pengembangan Potensi Kelautan Puger" Makalah Disampaikan dalam Dialog Solutif bersama Calon Gubernur Jawa Timur 2008-2013, Ibu Khoifah Indar Parawansa, bertempat di TPI Puger, Kabupaten Jember, yang Diselenggarakan oleh LSM *In-TeReSt*.

-----, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Arruzz Media, hal. 126-127.

Ma'arif, Samsul, 2009, "Potensi Daerah Pesisir dan Laut sangat Potensial", disampaikan dalam rangka Pelantikan Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), di Surabaya, Rabu (25/3/09).

Midgley, James. 1995. *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.

Midgley, James and Amy Conley. 2010. *Social Work and Social Development, Theories and Skills for Development Social Work*. England: Oxford University Press.

Popple, Keith. 1995. *Analysing Community Work, Its Theory and Practice*. Buckingham: Open University Press.

Siswanto, Budi. 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Surabaya: Laksbang Mediatama

Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sukmana, Oman. 2010. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas Berbasis Potensi Lokal (studi di desa Wisata-Bunga Sidomulyo, Kota Batu Jawa Timur). *Jurnal Humanity*. Volume 6. Nomor 1, September 2010: 59 – 64.

Traynor, William J. And Jessica Andors. 2005. "Network Organizing: A Strategy for Building Community Engagement". *Working Paper of Strategy Development*.

Undang-Undang No. 27, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Zeuli, Kimbarly and Jamie Radel. 2005. "Cooperative as a Community Development Strategy: Linking Theory and Practice". *Journal of: Regional Analysis and Policy*. Vol. 35. No. 1.

Zhang, Xiaoling; Liyin Shen; Yuzhe Wu. 2011. "Green Strategy for Gaining Competitive Advantagein Housing Development: A China Study". *Journal of Cleaner Production*. Vol. 19. Issue 2 – 3. Pages 157 – 167. January-February 2011.